

Kursi di DPRD Bertambah jadi 50

TUNTANG - Jatah kursi di DPRD Kabupaten Semarang bertambah menjadi 50 kursi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Hal tersebut mengacu Undang-undang Pemilu yang baru, apabila jumlah penduduk kabupaten/kota yang sudah mencapai antara 1 juta hingga 3 juta orang, maka alokasi jatah kursi yang diberikan adalah 50 kursi.

"Berdasarkan data dari Dispendukcapil, jumlah penduduk di Kabupaten Semarang per semester ini 1.005.677 orang. Artinya, dimungkinkan jumlah anggota DPRD menjadi 50 orang," kata Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan ketika jadi pembicara di Seminar Pemberdayaan dan Penguatan Peran Politik Masyarakat di aula Rumah Makan Cikal Gading, Tuntang, Kamis (27/7) siang.

Berkaitan dengan jumlah daerah pemilihan (dapil), di dalam UU Pemilu yang baru disebutkan bahwa jumlah kursi setiap dapil, khususnya kabupaten/kota antara 3 sampai 12 kursi.

Sementara pada Pileg 2014 lalu, jumlah kursi setiap dapil hanya 3 sampai 11 kursi. "Apakah dapilnya akan bertambah

atau tetap, kaitannya dengan penambahan jumlah kursi, jawabannya masih menunggu Peraturan KPU (PKPU)," imbuhnya.

Karena di dalam UU Pemilu yang baru diamanatkan, bahwa penentuan dapil khususnya DPR dan DPR Provinsi sudah termasuk bagian dari lampiran UU tersebut. Namun, dapil kabupaten/kota masih mengacu PKPU. KPU yang menetapkan, atas masukan DPR dan pemerintah. Masukan dari partai politik peserta Pileg, dapat disampaikan ke DPR agar pelaksanaan Pileg tidak ada masalah.

"Penentuan dapil di samping menunggu PKPU, kami juga berkoordinasi, berkonsultasi dengan KPU pusat. Teman-teman partai politik tentu akan kami dengar masukannya agar

saat pelaksanaan nanti tidak ada masalah," ucap Guntur.

■ Jangan Dipilih

Di hadapan utusan partai politik, organisasi keagamaan, sekretaris desa, dan perwakilan mahasiswa yang hadir, Guntur merinci waktu pendaftaran partai politik peserta Pileg akan dibuka pada Oktober 2017. Maret 2018 akan dilakukan penetapan partai politik peserta Pemilu. Adapun pendaftaran caleg, dijadwalkan sekitar Mei 2018 mendatang.

"Yang jelas, jumlah dapil dan jatah kursi DPR itu mengacu jumlah penduduk bukan jumlah pemilih. Apabila ada perkembangan informasi, secepatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat," kata Guntur.

Selain Guntur, seminar yang digagas Kesbangpol Kabupaten Semarang juga menghadirkan staf pengajar FISIP Undip, Muchamad Yulianto. Dalam paparannya, dia mengkritisi tentang reformasi politik. Yang mana mengacu demokrasi terbuka, bebas, plural, serta rakyat yang berdaulat sebagai pilihan bermasyarakat, dan bernegara.

"Kalau untuk bersih sama sekali saya kira sulit. Dalam berbagai kesempatan saya selalu menekankan akan fungsi partai

politik," kata Yulianto.

Di antaranya berfungsi sebagai kanalisasi atau menyalurkan aspirasi masyarakat, katalisasi mengawal aspirasi, memperkuat dan mendorong realisasi aspirasi, sosialisasi informasi ke masyarakat, menjalankan pendidikan politik, dan berfungsi sebagai mencari selain mengajukan calon pemimpin seperti dalam Pilkada atau Pilpres.

"Kalau caleg tak bisa membawa aspirasi pemilih, ya besok jangan dipilih lagi. Masyarakat harus berperan dan harus pintar, jangan hanya diam dan akhirnya golput. Jika itu terjadi dikhawatirkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat curang," tandas dia.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang, Haris Pranowo menambahkan, pemilih Pilgub, Pileg, dan Pilpres berdasarkan data Dispendukcapil. Sejauh ini, warga pemilih yang sudah melakukan rekam data KTP elektronik masih 80 persen.

"Dasarnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) dari rekam data KTP elektronik. Jadi apabila warga pemilih belum melakukan rekam data, silakan melakukan rekam data supaya bisa memberikan hak suaranya," kata Haris. ■ *SMNetwork/H86-SR*



SAMPAIKAN PAPARAN: Staf pengajar FISIP Undip, Muchamad Yulianto menyampaikan paparan tentang peran elemen sosial dalam kedewasaan politik ketika jadi pembicara di Seminar Pemberdayaan dan Penguatan Peran Politik Masyarakat, Kamis (27/7) siang. ■ *Foto: SMNetwork/Ranin Agung-SR*